



LAPORAN KINERJA

**BALAI PPMHKP
ENTIKONG**

**TRIWULAN I
2026**

**LAPORAN KINERJA
BALAI KIPM ENTIKONG
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KIPM ENTIKONG
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong (LKj BKIPM Entikong) Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini menggambarkan capaian kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam menyelenggarakan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan selama periode Tahun 2025 dan disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja BKIPM Entikong di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun Anggaran 2026. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.



Entikong, 2 April 2026
Plt. Kepala Balai KIPM Entikong,

Rahmat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2026, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Awal Tahun 2026. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Capaian Kinerja Tahun 2026 secara keseluruhan termasuk berhasil, dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025 sebesar 106,73% (baik) berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Indikator Kinerja yang telah mencapai target pada Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Dari 11 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2026, terdapat 5 IKU yang pencapaiannya memenuhi dan kurang mencapai target.
- b. Uraian 8 IKU yang pencapaiannya memenuhi dan kurang mencapai target yang ditetapkan, yaitu :
 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong target 72% realisasi 65% (90,28%);
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong target 72% realisasi 76,85% (106,74%);
 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Entikong target 86% realisasi 100% (116,28%);
 4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Entikong target 77 realisasi 100 (120%);
 5. Indeks kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong target 3,5 realisasi 3,80 (108,57%);

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2026 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai PPMHKP Entikong mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai PPMHKP Entikong dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Entikong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Entikong. Laporan kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada Balai PPMHKP Entikong serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Entikong. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai otoritas kompeten penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, tugas Balai PPMHKP Entikong adalah melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Balai PPMHKP Entikong menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
6. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
7. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian

dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Jenis layanan publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

a. Pelayanan Administratif :

1. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
2. Sertifikasi Cara Pembenihan yang Baik (CPIB);
3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan (CBIB);
4. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
5. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
6. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB);
7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
8. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PPMMT/HACCP);
9. Sertifikasi penerapan Distribusi Ikan (SPDI);
10. Sertifikasi Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor); dan
11. Surat Pengesahan Nomor Registrasi Ekspor (*Approval Number*) Negara Mitra.

b. Pelayanan Jasa Publik :

1. Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu, dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air; dan
3. Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif.

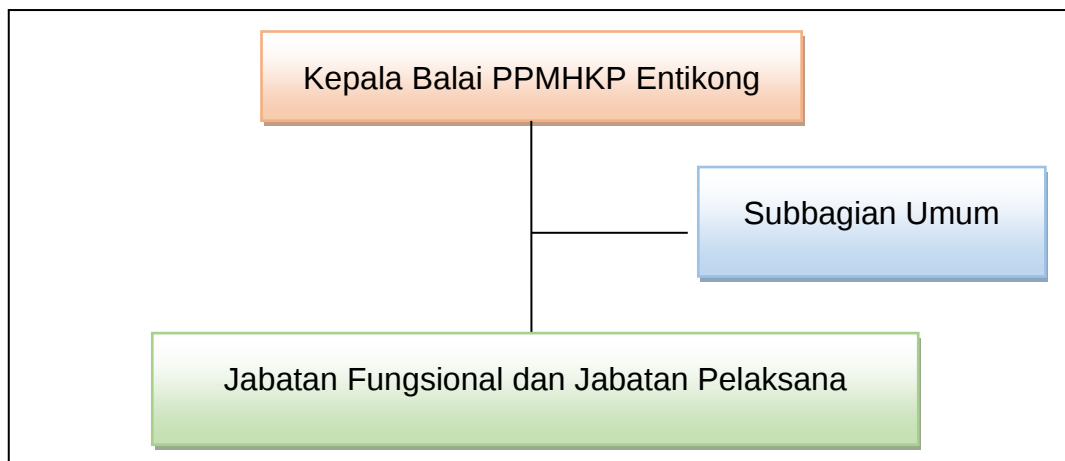
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Entikong, Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong merangkap Inspektur Mutu dibantu oleh 23 orang ASN yang terdiri dari 7 orang PNS, 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Jabatan	Jumlah
Plt. Kepala UPT merangkap Inspektur Mutu	1 orang
Kepala Subbagian Umum	1 orang

Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu	5 orang
Arsiparis Pertama	1 orang
Pengadministrasi Pengujian	1 orang
Penata Layanan Operasional	5 orang
Pengelola Layanan Operasional	3 orang
Operator Layanan Operasional	4 orang
Pengadaministrasi Perkantoran	2 orang
Jumlah Pegawai	23 orang

Tabel 1. Tabel Kepegawaian Balai PPMHKP Entikong

Struktur Organisasi Balai PPMHKP Entikong



Gambar 1

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kealutan dan Perikanan Entikong disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dalam RENSTRA BPPMHKP 2026-2029 yaitu pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui tiga dari empat program utama, yaitu :

No	Isu Strategis	Tantangan	Strategi Pelaksanaan
1	Pengawasan Mutu Produksi Primer	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu	Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga Kelautan dan Perikanan dalam penerapan standar
2	Pengawasan Mutu	Kurangnya sarana pengujian mutu	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi

	Pascapanen		traceability
3	Dukungan Manajemen	Efisiensi tata kelola internal madih perlu diperkuat	Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kealutan dan Perikanan Entikong Tahun 2026 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar yang telah disahkan Kepala BKIPM Entikong
- b. Ringkasan Executive
- c. BAB I – Pendahuluan,
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- d. BAB II – Perencanaan Kinerja,
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2026;
- e. BAB III – Akuntabilitas Kinerja,
Menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- f. BAB IV – Penutup,
Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- g. BAB V – Lampiran,
Memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi BKIPM Entikong ditetapkan sesuai dengan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang selaras dengan RESTRA visi KKP 2026-2029 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2026-2029 ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis, swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia, dan hilirisasi komoditas.

Mengacu pada Asta Cita Presiden sebagai bagian dari RPJMN 2026-2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional, maka Balai PPMHKP Entikong sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat), yaitu:

1. Asta Cita 1 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian cemaran biologis, kimia, dan fisik dalam produk perikanan agar memenuhi standar pangan nasional dan internasional;
2. Asta Cita 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan UMKM melalui Sertifikasi mutu hasil perikanan, Bimbingan Teknis dan fasilitasi

penerapan sistem mutu kepada UMKM pengolah hasil perikanan, Fasilitas sistem traceability dan standar mutu global;

3. Asta Cita 6 : Pemetaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Tujuan pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kealutan dan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai Balai PPMHKP Entikong dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP antara lain :

1. Meningkatkan peran serta dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan serta menjamin mutu hasil perikanan nasional sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai PPMHKP Entikong

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai PPMHKP Entikong Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 2.1. di bawah ini :



Gambar 2
Peta Strategis Balai KIPM Entikong Tahun 2026

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026 BKIPM ENTIKONG

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Entikong Tahun 2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KEALUTAN DAN
PERIKANAN ENTIKONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	3,5

DATA ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	84.750.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Jeamanan Hasil Perikanan	4.357.733.000
Total Anggaran Balai PPMHKP Entikong Tahun 2026		4.442.483.000

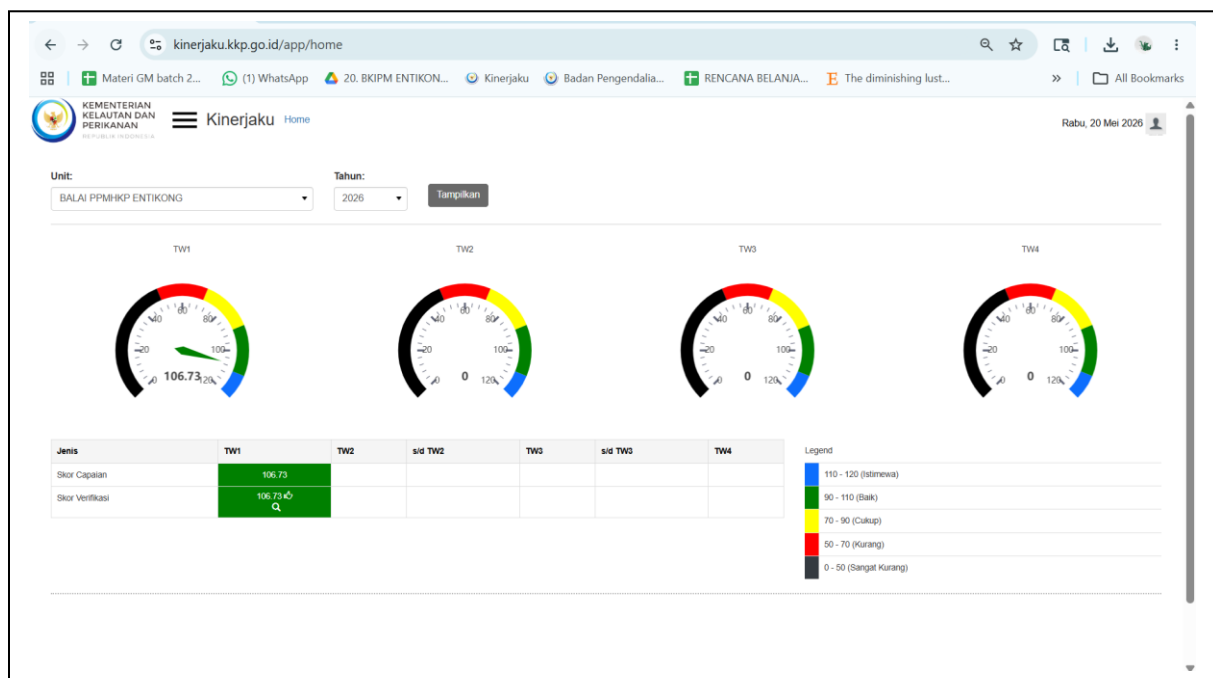
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Triwulan I Tahun 2026 dnegan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,73% (baik) berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2026.



Gambar 3

Dashboard Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026 BKIPM Entikong

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai PPMHKP Entikong Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan sasaran kinerja secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	72	65 (90,28%)
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	72	76,85 (106,74%)
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	71	0
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	82,5	0
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	77	0
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	86,2	0
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Persen)	86	100 (116,28%)
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	92,1	0
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	71,75	0
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	77	100 (120%)
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	3,5	3,80 (108,57%)

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) menjadi tolak ukur dari keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Entikong. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup BKIPM Entikong sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Realisasi TW I Tahun 2026
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	70	-
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	70	100 (120%)
3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	99	100 (101,01%)

Tabel 4. Capaian Sasaran Kinerja 1 Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2026

IK1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula perhitungan :

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong

Formula :

$$\%X = ((A+B+C+D+E+F) \times n) \times 100\%$$

Ket :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn= Jumlah dan unsur Pembentuk *)

***) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT**

Pada Triwulan I Tahun 2026 target Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong perhitungan target IK Tahunan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BPPMHKP 2026-2029		
TW II	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2026	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2027	%Capaian thd Target Restra
0	100	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0

IK2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang

dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

Formula perhitungan :

$$\%X = ((A+B)/xn) \times 100\%$$

Keterangan :

%X Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Realisasi : 7 Sertifikat Kelayakan Produksi PT. WELINDO ERABADI LOJAYA

$$\%X = (((0+(7/7))/1) \times 100\% = 100\%$$

Tabel 6.a. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BPPMHKP 2026-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2027	%Capaian thd Target Restra
0	100	100	70	100	120	-	70	100	70	70	70

1. Capaian IKU

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong merupakan IK baru dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan. Target IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong pada Triwulan I, Tahun 2026, Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 70%. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2026 dan Tahunan 2026 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 70% dan target IK Tahun 2026 serta Target RENSTRA yaitu 70% terhadap prosentase target 120%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2026

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong merupakan IK baru sejak triwulan IV tahun 2025 dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan capaian IK Triwulan I tahun 2025 dan tahun 2025. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target IK Triwulan I Tahun 2026 yaitu 70% dan target IK Tahun 2025 70% terhadap prosentase target 120%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2025 yaitu 70%. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (120%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BPPMHKP 2025-2029 yaitu 70% di tahun 2026, capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (120%).

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong efisien karena kegiatan dilaksanakan secara daring akibat kebijakan efisiensi anggaran.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong merupakan IK baru dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan. Pada triwulan I tahun 2026 Balai PPMHKP Entikong berhasil menerbitkan 7 Sertifikat Kelayakan Produksi PT. WELINDO ERABADI LOJAYA.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong kegiatan dilaksanakan secara daring akibat kebijakan efisiensi anggaran, yang disampaikan berdasarkan komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.b. Realisasi Anggaran IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3989.PDC] 001.051 Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI	0	0	100

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAKTI)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kealutan dan Perikanan Entikong pada Triwulan III Tahun 2026, yaitu :

- BKIPM Entikong mengevaluasi sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat HACCP yang akan habis masa berlaku dan belum diperpanjang;
- BKIPM Entikong akan segera menghubungi UPI untuk memperpanjang sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat HACCP yang akan habis masa berlaku dan belum diperpanjang;
- BKIPM Entikong melaksanakan survailen terhadap permohonan perpanjangan sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat HACCP yang akan habis masa berlaku dan belum diperpanjang

IK3. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Formula perhitungan : $\%X = ((A-B)/A) \times 100\%$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Pada Triwulan I tahun 2026 sertifikat kesehatan ekspor yang diterbitkan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kealutan dan Perikanan Entikong ditampilkan dalam tabel 7 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor	Frekuensi penolakan oleh Negara tujuan
April	24	24	0
Mei	35	35	0
Juni	20	20	0
Jumlah	79	79	0

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026 BKIPM ENTIKONG

$$\%X = ((A-B)/A) \times 100\%$$

$$\%X = ((79-0)/79) \times 100\% = 100\%$$

Tabel 7.a. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BPPMHKP 2026-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2027	%Capaian thd Target Restra
0	100	100	99	100	101,01	101,01	99	101,01	99	99	101,01

1. Capaian IKU

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong merupakan IK baru dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Target IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong pada Triwulan I, Tahun 2026, Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BPPMHKP adalah 99%. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2026 dan Tahunan 2026 telah mencapai target IK Triwulan IV yaitu 99% dan target IK Tahun 2025 serta Target RENSTRA yaitu 99% terhadap prosentase target 101,01%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2025

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong merupakan IK yang ditetapkan kembali sejak Triwulan IV Tahun 2025 dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan capaian IK Triwulan I dan Tahun 2025. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 99% dan target IK Tahun 2025 99% terhadap prosentase target 101,01%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BPPMHKP 2025-2029 yaitu 99%. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (101,01%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2025-2029 yaitu 99% di tahun 2026, capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi

100% (101,01%).

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong efisien karena anggaran diefisiensi dan pelaksanaan sertifikasi melalui aplikasi SIAP MUTU.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong merupakan IK yang ditetapkan kembali sejak Triwulan IV Tahun 2025 dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan. Pada tahun 2026 Balai PPMHKP Entikong selama Triwulan II berhasil menerbitkan 79 Sertifikat Jaminan Mutu Kelautan Hasil Perikanan dengan 0 penolakan oleh Negara tujuan yaitu Malaysia.

7. Realisasi Anggaran

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong efisien karena anggaran diefisiensi dan pelaksanaan sertifikasi melalui aplikasi SIAP MUTU, yang disampaikan berdasarkan komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7.b. Realisasi Anggaran IK 3 pada Triwulan II Tahun 2026

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3989.BIA] Pengawasan dan Pengendalian Produk	0	0	100

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAKTI)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kealutan dan Perikanan Entikong pada Triwulan II Tahun 2026, yaitu :

- Pegawai CPNS Balai PPMHKP Entikong Tahun 2026 akan mengikuti sosialisasi Sistem Jaminan Mutu agar dapat meningkatkan pelayanan publik pada Balai PPMHKP Entikong;
- BKIPM Entikong melaksanakan sosialisasi terkait Sistem Jaminan Mutu kepada pengguna jasa saat pelaksanaan survailen SKP dan HACCP;
- BKIPM Entikong segera menindaklanjuti saat terdapat permohonan sertifikasi ekspor dan mengkomunikasikan kepada pengguna jasa untuk verifikasi dan jika terjadi kendala dalam proses sertifikasi akibat sinyal internet;

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari sasaran strategis, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM;

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diperoleh dari tabel 8. pencapaian indikator sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Realisasi TW I Tahun 2026
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	0	0
2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	0	0
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	85	100 (117,65%)
4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai PPMHKP Entikong (nilai)	88	93,75 (106,53%)

tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja 3 Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2026

IK4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai PPMHKP Entikong

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula :

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2026 =

(Jumlah Penyelesaian Temuan atas laporan keuangan TA. 2026 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan / Realisasi rill tahun 2026) X 100%

Pada tahun 2026 IK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Balai PPMHKP Entikong penilaian secara tahunan, sehingga target Triwulan I 2026 belum ada realisasi.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-8 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai PPMHKP Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BKIPM 2020-2026		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2026	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-

IK5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong Tahun 2026 yaitu 81 % yang dihitung semesteran bersumber dari website <http://ropeg.kkp.go.id/ip-asn/>.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II Tahun 2026

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-6 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BKIPM 2026-2029		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2026	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2026	%Capaian thd Target Restra

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026 BKIPM ENTIKONG

0	86,08	0	0	0	0	-	87	0	87	87	0
---	-------	---	---	---	---	---	----	---	----	----	---

IK6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai PPMHKP Entikong adalah jumlah rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP kepada Balai PPMHKP Entikong berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti dengan status proses dan atau tuntas oleh Balai PPMHKP Entikong yang menjadi objek pengawasan.

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan:

1. melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT
2. menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan
3. memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 80 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa Balai PPMHKP Entikong pada Triwulan I Tahun 2026 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk perbaikan Kinerja lingkup BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BKIPM 2020-2026		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2026	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
100	100	100	85	100	117,65	0	85	117,85	85	85	120

1. Capaian IKU

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan. Pada tahun 2026, IKU telah mencapai target triwulanan dan target tahunan, yaitu 120% dari target triwulanan dan tahunan yaitu 85% dengan realisasi 100%. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong pada Tahun 2026 mencapai 117,85% dari target sebesar 85%, dari hasil perhitungan diperoleh capaian tahun 2026 100%. Target IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 85% dengan capaian 100%, sehingga target pada Renstra BKIPM Entikong maupun Renstra BKIPM tercapai 117,85%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Triwulan I tahun 2025 capaian IKU 100% dan capaian Triwulan I tahun 2026 100%, baik pada Triwulan I tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026, capaian kinerja telah memenuhi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2025-2029 yaitu 805%, sedangkan untuk target tahun 2026 yaitu 85%. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 yaitu 100% terhadap target jangka menengah 85% yaitu 117,65 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2025-2029 pada tahun 2026 yaitu 100% dari target 85%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2025-2029 yaitu 85% di tahun 2026, ditargetkan dapat konsisten dengan target 85% pada tahun 2026. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah memenuhi target Renstra BKIPM Entikong 2020-2026 pada tahun 2026 yaitu 100% dari target 85%.

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

Terdapat efisiensi anggaran dikarenakan audit Itjen telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan telah selesai ditindaklanjuti.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pada Triwulan I tahun 2026 BKIPM Entikong belum ada temuan Itjen KKP. Pemantauan tindak lanjut temuan Itjen dengan 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari belum ada penyerapan anggaran karena pengawasan bersifat intern dan telah dilaksanakan pada tahun 2026.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keuluatan dan Perikanan Entikong pada Triwulan III Tahun 2026, yaitu: segera menyelesaikan tindak lanjut temuan Itjen KKP atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

IK7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai PPMHKP Entikong

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat pada website : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>.

Formula :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur = 1 / 9 = 0.1111

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026 BKIPM ENTIKONG

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}) / \text{Total unsur yang terisi}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 9. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	3,26 - 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan

Tabel 10.a. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan-3 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan											
IK-12 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai PPMHKP Entikong											
Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2026							Renstra BKIPM 2020-2026		
TW I	2025	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	%Realisasi thd Target PK	Target 2026	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
91,76	94	94	88	93,75	106,53	1,50	88	106,53	88	88	106,53

1. Capaian IKU

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai PPMHKP Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Target IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai PPMHKP Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 88. Realisasi IK yaitu 93,75 pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 88 dan target IK Tahun 2026 terhadap prosentase target 106,53%. Realisasi IK yaitu 91,76 pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 81 dan target IK Tahun 2025 = 84 terhadap prosentase target 109,24%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I

Tahun 2025

Realisasi IK yaitu 93,75 pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 88 dan target IK Tahun 2026 terhadap prosentase target 106,53%. Realisasi IK yaitu 91,76 pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 81 dan target IK Tahun 2025 = 84 terhadap prosentase target 109,24%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2025-2029 yaitu 88. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 93,75 (108,35%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2025-2029 yaitu 84 di tahun 2026, capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 95,35 (106,53%).

6. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai PPMHKP Entikong efisien karena pengumpulan data kuesioner melalui website <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>.

8. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 kualitas pelayanan BKIPM Entikong dipersepsikan “Sangat Baik” oleh masyarakat, hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh total nilai rata-rata dari 9 unsur SKM sebesar 95,35. Unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur Sistem, Mekanisasi dan Prosedur, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan Waktu Pelayanan. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang tersedia pada kantor pelayanan BKIPM Entikong sudah sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan. Pada unsur Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana dan Produk Spesifikasi Pelayanan memiliki nilai paling rendah, hal ini dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya sinyal baik dari provider seluler maupun wifi pada kantor Balai PPMHKP Entikong sehingga proses pelayanan publik terkendala.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Rincian *Output* [3990.ADD] 001.C Survey Kepuasan

Masyarakat yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dianggarkan Rp 0,-, dimerger ke DIPA Stasiun KIPM Pontianak sebagai berikut :

Tabel 10.b. Realisasi Anggaran IK 7 pada Triwulan I Tahun 2026

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3990.ADD] 001.C Survey Kepuasan Masyarakat	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAS)

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keuluatan dan Perikanan Entikong pada Triwulan II Tahun 2026, yaitu :

Mengevaluasi jaringan internet agar sinyal stabil sehingga respon petugas dalam melayani permohonan sertifikat dapat cepat;

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Entikong Triwulan I Tahun Anggaran 2026 menyajikan Indikator Kinerja yang tercapai dan tidak tercapai pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Terhadap capaian IKU tersebut akan dijadikan bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai PPMHKP Entikong yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, antara lain :

1. Dari 7 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2026, terdapat 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target.
2. Uraian 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu :
 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong target 70% realisasi 100% (120%);
 2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong target 99% realisasi 100% (101,01%);
 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai PPMHKP Entikong target 85 realisasi 100 (117,65%);
 4. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong target 88 realisasi 93,75 (106,53%).

Perencanaan dan monitoring pencapaian setiap triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun dan hasil evaluasi dari capaian IKU periode sebelumnya.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi Balai PPMHKP Entikong pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026, sebagai peningkatan kinerja pada periode selanjutnya perlu dilakukan perbaikan, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator yang akan diukur pada periode selanjutnya, agar target tercapai;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan Rencana Aksi BKIPM Entikong yang telah disusun